

**PENGARUH BELANJA DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/ KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

RENDY BAYU ADHA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURES AND LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE ON POVERTY (CASE STUDY AT THE REGENCIES/CITIES IN LAMPUNG PROVINCE)

By

RENDY BAYU ADHA

This study aimed to determine the effect of local government expenditures for education, healthcare, infrastructure and agriculture as a proxy of local government expenditures on poverty. And to examine the effect of self-sufficiency ratio, ratio of financial effectiveness, and the harmony ratio as a proxy of local government financial performance on poverty.

The sampling method used in this study is purposive sampling from local government regencies/cities in Lampung Province during 2011-2013. To analyze the data, this study used multiple regression method with panel data and fixed effect model. The results showed that the local government expenditures for education and self-sufficiency ratio has the significant effect on poverty reduction. Meanwhile, ratio of PAD effectiveness has positive effect on poverty. While other variables such as local government expenditures of health, infrastructure, agriculture, and the harmony ratio of capital expenditure has no effect on poverty reduction.

Keywords: local government expenditures, local government financial performance, poverty

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

RENDY BAYU ADHA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, belanja urusan pekerjaan umum dan belanja urusan pertanian sebagai proksi dari belanja daerah berpengaruh terhadap kemiskinan. Serta meneliti pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja daerah sebagai proksi dari kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan.

Sampel penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling* dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2011-2013. Untuk menganalisis data digunakan metode regresi berganda data panel dengan model efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah urusan pendidikan, rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel lain seperti belanja urusan kesehatan, belanja urusan pekerjaan umum, belanja urusan pertanian dan rasio keserasian belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: belanja daerah, kinerja keuangan daerah, kemiskinan

**PENGARUH BELANJA DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KEMISKINAN (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/ KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG)**

**Oleh
RENDY BAYU ADHA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

**pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**: PENGARUH BELANJA DAERAH DAN
KINERJA KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KEMISKINAN
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Rendy Bayu Adha

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1411031145

Program Studi

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19790222 200912 1 001

MENGETAHUI

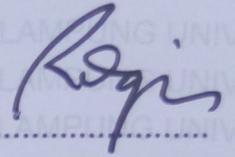
2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

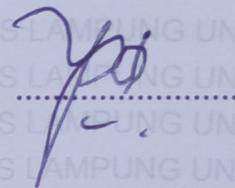
Ketua : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**



Sekretaris : **Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt.**



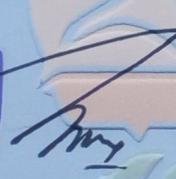
Penguji Utama: **Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 196109041987031011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Oktober 2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rendy Bayu Adha**

NPM : **1411031145**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, ataupun hasil kerja keras orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Rendy Bayu Adha

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Desa Dayamurni, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai putra pertama dari tiga bersaudara pasangan Heri Purnomo dan Rusmiyati.

Penulis menempuh pendidikan dasar formal diantaranya:

1. SD Gula Putih Mataram (GPM), lulus tahun 1999.
2. SMP Gula Putih Mataram (GPM), lulus tahun 2002.
3. SMA Negeri 9 Bandar Lampung, lulus tahun 2005.

Selanjutnya, penulis diterima dan menyelesaikan pendidikan Program Diploma III (D-III) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta pada tahun 2008.

Dan pada tahun 2010, penulis mulai bekerja sebagai Auditor Pelaksana di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara hingga tahun 2014.

Penulis menerima beasiswa program STAR (*State Accountability Revitalization*) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk pendidikan Program Strata 1 (S-1) jurusan Akuntansi pada tahun 2014. Dan pada tahun 2016, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi sekaligus pembimbing akademik selama menjalani perkuliahan di Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku dosen Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengetahuan, nasihat, dukungan, pelajaran, pengalaman, serta pembelajaran diri yang sangat berkesan selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaannya untuk meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengetahuan, nasihat, dukungan, pelajaran, pengalaman, serta pembelajaran diri yang sangat berkesan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., selaku Penguji Utama atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan dan bantuan yang telah diberikan. Terima kasih untuk Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. yang sempat menjadi pembahas pada seminar proposal, untuk segala bimbingan, pengarahan, dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Ibu Rusmiyati dan Bapak Heri Purnomo yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa serta selalu memberikan, nasihat, dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
9. Adik-adikku, Retno Herlinawati dan Lisa Apriani yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan, STAR BPKP *batch* 1 angkatan 2014; Dian Margi Putra Asmorojati, Ersya Resya Ranilhaj, Mujiyanto, Ilham Irawan Romadhoni, Hubert Sijabat, Irwansyah Adnansaid, Raden Hepzi Irawan, Benny Tibestri Siallagan, Janson Yanda Hutauruk dan Toni Pebriansya, terima kasih untuk kebersamaan, bantuan dan dukungan kalian selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2016
Penulis,

Rendy Bayu Adha

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi Fiskal.....	10
2.2 Kemiskinan.....	12
2.2.1 Definisi Kemiskinan.....	12
2.2.2 Pengukuran Kemiskinan.....	13
2.3 Belanja Daerah Urusan Pendidikan.....	15
2.4 Belanja Daerah Urusan Kesehatan.....	16
2.5 Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Umum.....	17
2.6 Belanja Daerah Urusan Pertanian.....	19
2.7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	20
2.8 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	21
2.9 Rasio Keserasian Belanja.....	21
2.10 Penelitian Terdahulu.....	22
2.11 Pengembangan Hipotesis.....	24
2.11.1 Pengaruh Belanja Urusan Pendidikan Terhadap Kemiskinan.....	24
2.11.2 Pengaruh Belanja Urusan Kesehatan Terhadap Kemiskinan.....	25
2.11.3 Pengaruh Belanja Urusan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan.....	26
2.11.4 Pengaruh Belanja Urusan Pertanian Terhadap Kemiskinan.....	28

2.11.5 Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Kemiskinan	29
2.11.6 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kemiskinan	30
2.11.7 Pengaruh Rasio Keserasian Belanja Modal Terhadap Kemiskinan	31

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel	33
3.1.1 Populasi	33
3.1.2 Sampel	33
3.2 Jenis dan Sumber Data	34
3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	34
3.4.1 Variabel Independen.....	34
3.4.2 Variabel Dependen	38
3.5 Metode Analisis	39
3.5.1 Analisis Regresi	39
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	42
3.5.3 Pengujian Hipotesis	45

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif	48
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Pemilihan Model Regresi.....	51
4.2.1.1 Uji Chow	52
4.2.1.2 Uji Hausman.....	53
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	53
4.2.2.1 Uji Normalitas	53
4.2.2.2 Uji Autokorelasi	54
4.2.2.3 Uji Multikolinieritas.....	55
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.2.3 Pengujian Hipotesis	57
4.2.3.1 Estimasi Model Regresi Data Panel.....	57
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
4.2.3.3 Uji Koefisien Regresi Parsial	58
4.2.3.4 Uji Signifikansi Simultan.....	60
4.3 Pembahasan	61
4.3.1 Pengaruh Belanja Urusan Pendidikan Terhadap Kemiskinan	61
4.3.2 Pengaruh Belanja Urusan Kesehatan Terhadap Kemiskinan	62
4.3.3 Pengaruh Belanja Urusan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan.....	63
4.3.4 Pengaruh Belanja Urusan Pertanian Terhadap Kemiskinan	65
4.3.5 Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Kemiskinan	66

4.3.6 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kemiskinan	67
4.3.7 Pengaruh Rasio Keserasian Belanja Modal Terhadap Kemiskinan.....	67

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	69
5.2 Keterbatasan Penelitian	71
5.3 Implikasi.....	71
5.4 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2010-2014.....	3
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	22
3.1	Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah	37
3.2	Rasio dan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah.....	37
3.3	Keserasian Belanja Keuangan Daerah.....	38
4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	48
4.2	Rentang Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson.....	55
4.3	Matriks Korelasi Antar Variabel Bebas.....	55
4.4	Nilai Probabilitas Variabel Bebas Berdasarkan Uji Glesjer	56
4.5	Hasil Regresi Data Panel Model <i>Fixed Effect</i>	57
4.6	Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).....	58
4.7	Persentase Alokasi Anggaran Belanja Kesehatan Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	62
4.8	Persentase Alokasi Anggaran Belanja Pertanian Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	65
4.9	Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2013	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Perkembangan Indeks Kemiskinan dan Anggaran Belanja Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2010-2013.....	3
4.1	Hasil Uji Normalitas.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Data Indeks Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2013 (persen)
2. Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pendidikan Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010-2012 (rupiah)
3. Alokasi Anggaran Belanja Urusan Kesehatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010-2012 (rupiah)
4. Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pekerjaan Umum Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010-2012 (rupiah)
5. Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pertanian Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010-2012 (rupiah)
6. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2013 (persen)
7. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2013 (persen)
8. Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2013 (persen)
9. Estimasi dengan Model *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*
 - a. Model *Common Effect/Ordinary Least Square* (OLS)
 - b. Model *Fixed Effect*
 - c. Model *Random Effect*
10. Pemilihan Model Regresi dengan Uji *Chow*
11. Pemilihan Model Regresi dengan Uji *Hausman*
12. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji *Glesjer*)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah lebih dari satu dasawarsa diterapkan di Indonesia tepatnya sejak tanggal 1 Januari 2001, setelah terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui undang-undang ini, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang lebih luas dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Terutama terkait fungsi alokasi, dengan desentralisasi fiskal akan mempermudah proses alokasi sumber daya dari pemerintah daerah kepada masyarakat melalui belanja daerah sehingga dapat membantu program-program prioritas pemerintah terutama pengentasan kemiskinan di daerah.

Menurut Simanjuntak (2002) dalam Parhah (2006) pada dasarnya desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai beberapa sasaran umum, yaitu: 1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara; 2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah

daerah; 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; 4) mengurangi ketimpangan antar daerah; 5) menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum disetiap daerah; 6) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan serta diharapkan akan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah karena pemerintah daerah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah mempunyai peluang dan kesempatan lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional serta akan menjadi penghalang dalam mencapai tingkat pembangunan atau pertumbuhan suatu negara, sehingga memerlukan peran aktif berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat sendiri. Dalam satu dekade, kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan baik secara persentase maupun dalam jumlah penduduk miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan pada tahun 2003 adalah 17,42% dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 10,96% pada tahun 2014. Namun, secara absolut persentase tersebut masih sangat besar karena jika dihitung secara jumlah mencapai 27.727.778 jiwa penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk miskin sebagian besar masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Lampung adalah masih cukup tingginya angka kemiskinan yaitu 14,28 persen pada tahun 2014, sehingga masih cukup jauh jika dibandingkan dengan target capaian *Millenium Development Goals*

(MDGs) sebesar 7,55 persen ditahun 2015. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung berdasarkan data BPS per September 2014 adalah 1.143.934 jiwa dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan adalah 224.208 jiwa dan penduduk miskin di pedesaan adalah 919.726 jiwa. Secara keseluruhan, dari total persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung, sebaran persentase penduduk miskin di perkotaan 10,69 persen dan di pedesaan 15,46 persen.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2010 – 2014

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1	Aceh	20,98	19,57	19,46	17,6	17,94	19,11
2	Sumatera Utara	11,31	11,33	10,67	10,06	10,13	10,70
3	Sumatera Barat	9,50	9,04	8,19	8,14	7,53	8,47
4	Riau	8,65	8,47	8,22	7,72	8,17	8,25
5	Jambi	8,34	8,65	8,42	8,07	7,92	8,27
6	Sumatera Selatan	15,47	14,24	13,78	14,24	13,81	14,30
7	Bengkulu	18,30	17,49	17,70	18,34	17,48	17,86
8	Lampung	18,94	16,93	16,18	14,86	14,28	16,32
9	Bangka Belitung	6,51	5,75	5,53	5,21	5,36	5,67
10	Kepulauan Riau	8,05	7,40	7,11	6,46	6,70	7,14

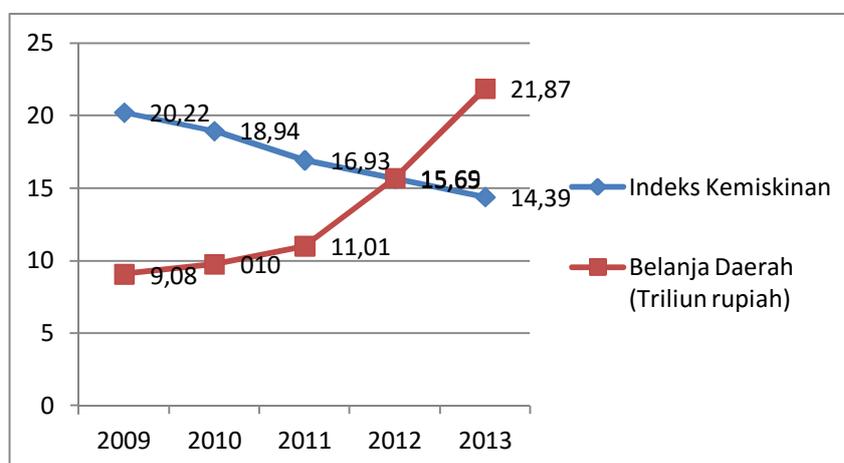
Sumber: BPS Provinsi Lampung

Tabel 1.1 di atas menunjukkan persentase penduduk miskin disepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2010 sampai dengan 2014. Provinsi Aceh memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Sumatera dengan persentase penduduk miskin rata-rata 19,11 persen. Diurutan kedua adalah Provinsi Bengkulu dengan rata-rata persentase penduduk miskin 17,86 persen. Dan diurutan ketiga adalah Provinsi Lampung dengan rata-rata persentase penduduk miskin 16,32 persen.

Terkait dengan desentralisasi fiskal, kebijakan pengeluaran pemerintah dapat terlihat dari bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Wibowo, 2014). Belanja daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 31

terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sementara belanja urusan pilihan disesuaikan dengan potensi atau kekhasan yang dimiliki daerah misalnya dibidang kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian. Dalam penelitian ini, belanja daerah akan diproksikan dengan belanja urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan pertanian. Hubungan antara anggaran belanja (dalam jutaan rupiah) secara agregat per kabupaten/kota di Provinsi Lampung terhadap kemiskinan dapat terlihat dari gambar berikut:

Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Kemiskinan dan Anggaran Belanja Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013.



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dirjen Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan sejak tahun 2009 hingga tahun 2013. Hal ini seiring dengan kecenderungan kenaikan alokasi anggaran belanja di kabupaten dan kota di Provinsi Lampung selama periode waktu yang sama.

Sehingga menjadi isu penting apakah belanja daerah diprioritaskan pada urusan yang berpengaruh positif terhadap usaha pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan.

Hal lain yang tidak kalah penting dengan diterapkannya desentralisasi fiskal adalah capaian keberhasilan kinerja pemerintah daerah akan diukur, untuk melihat baik atau tidaknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Salah satu indikasi kinerja keuangan yang baik dapat tercermin dari perubahan yang nyata pada program-program penting yang menjadi prioritas, yang salah satunya dan menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan.

Beberapa studi terdahulu yang menggunakan ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah (Astuti, 2015; Batafor, 2011; Hamzah, 2008; Mizkan, dkk., 2015; Tias, 2015) menggunakan rasio-rasio yang dipakai oleh Halim (2004) diantaranya rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian.

Penting untuk diketahui apakah pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya telah diarahkan dalam usaha-usaha yang berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sehingga penelitian ini akan memasukkan kinerja keuangan daerah sebagai salah satu variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan. Dalam penelitian ini, ukuran kinerja keuangan yang akan dipakai yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio keserasian.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudi (2011) tentang pengaruh alokasi belanja daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum terhadap penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara belanja pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum terhadap penurunan persentase kemiskinan. Selain itu, Utama dan Kustiani (2012) meneliti tentang pengaruh belanja daerah kualifikasi fungsi terhadap penanggulangan kemiskinan di Pulau Jawa dan Bali menyimpulkan bahwa belanja fungsi pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara belanja fungsi kesehatan, berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dan belanja fungsi perumahan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian Susilo (2014) tentang pengaruh belanja daerah untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pertanian terhadap penanggulangan kemiskinan dengan studi kasus di Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa belanja urusan pendidikan, kesehatan dan pertanian berpengaruh signifikan terhadap penurunan indeks kemiskinan, namun belanja urusan pekerjaan umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persentase kemiskinan. Penelitian ini akan memodifikasi penelitian Susilo (2014) dengan menambahkan variabel kinerja keuangan daerah seperti rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio keserasian belanja modal sebagai variabel independen. Selain itu, berbeda dengan penelitian Susilo yang menggunakan tiga ukuran kemiskinan, penelitian ini hanya menggunakan satu ukuran kemiskinan yaitu indeks kemiskinan (P_0).

Dari beberapa hal yang telah diungkapkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD melalui belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan belanja urusan pertanian serta peranan kinerja keuangan pemerintah berupa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio keserasian belanja

terhadap kemiskinan dengan judul **“Pengaruh Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah belanja daerah urusan pendidikan berpengaruh terhadap indeks kemiskinan pada kabupten/kota di Provinsi Lampung?
2. Apakah belanja daerah urusan kesehatan berpengaruh terhadap indeks kemiskinan pada kabupten/kota di Provinsi Lampung?
3. Apakah belanja daerah urusan pekerjaan umum berpengaruh terhadap indeks kemiskinan pada kabupten/kota di Provinsi Lampung?
4. Apakah belanja daerah urusan pertanian berpengaruh terhadap indeks kemiskinan pada kabupten/kota di Provinsi Lampung?
5. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio kemandirian berpengaruh terhadap indeks kemiskinan pada kabupten/kota di Provinsi Lampung?
6. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio efektivitas berpengaruh terhadap indeks kemiskinan pada kabupten/kota di Provinsi Lampung?
7. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio keserasian berpengaruh terhadap indeks kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Menemukan bukti pengaruh belanja daerah urusan pendidikan terhadap indeks kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
2. Menemukan bukti pengaruh belanja daerah urusan kesehatan terhadap indeks kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Menemukan bukti pengaruh belanja daerah urusan pekerjaan umum terhadap indeks kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
4. Menemukan bukti pengaruh belanja daerah urusan pertanian terhadap indeks kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
5. Menemukan bukti pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio kemandirian terhadap indeks kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
6. Menemukan bukti pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio efektivitas terhadap indeks kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
7. Menemukan bukti pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio keserasian terhadap indeks kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan serta bagaimana kinerja keuangan daerah berperan terhadap penurunan kemiskinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung terutama berkaitan dengan alokasi belanja daerah serta pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja keuangan agar dapat berperan dalam mengurangi angka kemiskinan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 8, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah (Sasana, 2009:104).

Menurut Barzelay (1991) dalam Sasana (2009) pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu: 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilitas dana. Menurut Sidik (2002) terdapat berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain

dikemukakan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995) seperti dikutip oleh Litvack *et al.* (1998) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien ketika diselenggarakan ditingkatkan yang terdekat dengan masyarakat karena:

1. Pemerintah daerah sangat mengetahui kebutuhan masyarakatnya;
2. Keputusan pemerintah daerah sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasinya.

Menurut Zang dan Zou (1998) dalam Parhah (2006) salah satu ukuran dari desentralisasi fiskal adalah meningkatnya pengeluaran pemerintah daerah relatif dibandingkan pemerintah pusat. Semakin besar rasio pengeluaran pemerintah daerah melalui mekanisme belanja daerah dibandingkan pemerintah pusat, menunjukkan tingkat desentralisasi yang semakin besar. Pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar tersebut secara implisit menunjukkan semakin besarnya investasi publik di masyarakat (Parhah, 2006:2).

Menurut Yao (2007:33) desentralisasi dapat meningkatkan peluang ekonomi masyarakat miskin dengan memengaruhi pendapatan pribadinya yaitu melalui empat cara:

- a. desentralisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi.
- b. desentralisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui tingkatan

- dan kualitas dari infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan sebagainya.
- c. desentralisasi dapat mendorong masuknya masyarakat miskin dalam proses pertumbuhan dengan menghilangkan batasan-batasan dan memberdayakan mereka melalui pendidikan yang lebih baik dan memberikan fasilitas kesehatan serta mendorong untuk mengambil peluang ekonomi yang ada.
 - d. pendapatan pribadi dapat dipengaruhi kebijakan redistribusi, baik melalui pajak maupun alokasi sumber daya.

2.2 Kemiskinan

2.2.1 Definisi Kemiskinan

Seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya, definisi kemiskinan kini telah mengalami perluasan. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi saja tetapi telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Kuncoro (2002) dalam Widodo dkk. (2011) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Sementara itu, kemiskinan menurut Arsyad (2002) dalam Susilo (2014) terdiri atas kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut dapat diartikan bahwa pendapatan individu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan dan tempat tinggal yang layak. Sementara itu, kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan pendapatan kelompok atau kelas tertentu dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, kemiskinan relatif melihat dari aspek ketimpangan sosial, karena bisa saja individu yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar

minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya (lingkungannya).

Chambers (1995) dalam Multifiah (2011) menyatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan ini sebenarnya terletak pada apa yang disebut dengan "deprivation trap" atau perangkap kemiskinan, dimana secara rinci *deprivation trap* terdiri dari lima unsur sebagai penyebab kemiskinan, yaitu: ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerawanan, ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, kekurangan modal, atau kerentanan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan isolasi (*isolation*).

2.2.2 Pengukuran Kemiskinan

Menurut Houghton dan Khanker (2009:67) terdapat beberapa pengukuran yang berkembang mengenai kemiskinan diantaranya *headcount index* yaitu indeks yang mengukur proporsi dari populasi yang merupakan penduduk miskin. *Poverty gap index* atau kedalaman kemiskinan, mengukur rata-rata kesenjangan kemiskinan proporsional dalam populasi (dimana masyarakat non-miskin memiliki tingkat kesenjangan kemiskinan nol). Ukuran ini menggambarkan biaya minimum menghilangkan kemiskinan (relatif terhadap garis kemiskinan), karena menunjukkan berapa banyak uang yang harus ditransfer kepada orang miskin untuk membawa mereka sampai dengan garis kemiskinan (sebagai proporsi dari garis kemiskinan). Kemudian tingkat keparahan kemiskinan atau *poverty severity index* yaitu ukuran yang merupakan rata-rata kuadrat kesenjangan kemiskinan relatif terhadap garis kemiskinan, dimana secara sederhana menggambarkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Mekanisme pengukuran kemiskinan lainnya seperti indeks *Sen-Shorrocks-Thon* menggabungkan langkah-

langkah dari proporsi penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, dan distribusi kesejahteraan diantara orang miskin. Selain itu, ada juga *Sen Index* yaitu indeks yang berusaha untuk menggabungkan efek dari jumlah orang miskin, kedalaman kemiskinan, dan distribusi kemiskinan dalam kelompok. Serta *Watts index* yaitu pengukuran yang mempertimbangkan asumsi tentang tingkat pertumbuhan ekonomi dibagi dengan tingkat pertumbuhan pendapatan (atau pengeluaran) dari orang miskin.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Penghitungan GK dilakukan terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Terdapat tiga pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik antara lain indeks kemiskinan atau persentase penduduk miskin (*head count index- P₀*) yang pertama kali digunakan pada tahun 1984 mencakup data kemiskinan tahun 1976-1981, kemudian indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index-P₁*) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index- P₂*). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan indeks yang menunjukkan ukuran rata-

rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Makin tinggi angka indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan merupakan indeks yang menunjukkan sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Untuk penelitian ini, konsep pengukuran kemiskinan mengikuti salah satu konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu dengan ukuran indeks kemiskinan (*head count index-P₀*). Hal ini terkait juga dengan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang dikeluarkan oleh BPS. Selain itu, ukuran indeks kemiskinan paling banyak digunakan untuk mengukur kemiskinan.

2.3 Belanja Daerah Urusan Pendidikan

Pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menjamin terselenggaranya pendidikan dasar bagi warganya dengan mengalokasikan anggaran di sektor pendidikan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Bentuk keseriusan pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang dalam pasal 49 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.

Investasi dalam sumber daya manusia (*human capital*) terutama di bidang pendidikan dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan menyediakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku guna meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kesempatan kerja (Boex *et al.*, 2006). Selain itu, Boex *et al.* (2006: 16) berpendapat bahwa dengan melakukan investasi pada pendidikan, selain akan meningkatkan potensi pendapatan individu, pendidikan akan menjadikan seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan baik di daerah maupun di tingkat pusat, pendidikan akan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dan menjadikan kehidupannya lebih produktif. Yao (2007: 108) menyatakan bahwa pendidikan terutama pendidikan dasar, telah terbukti berperan dalam pengurangan kemiskinan.

2.4 Belanja Daerah Urusan Kesehatan

Terdapat tiga tujuan pembangunan menurut Todaro dan Smith (2011) salah satunya adalah peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan. Kesehatan merupakan salah satu dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi semua orang untuk menjalani kehidupan. Bagi kelompok masyarakat miskin, kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang paling dasar. Karena tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin yang tidak sehat akan mengganggu produktivitasnya, yang selanjutnya akan berdampak pada kesejahteraannya. Menurut penelitian yang dilakukan Sahn dan Younger (2000) dalam Mosley *et al.* (2004) menemukan bahwa pengeluaran

pada sektor pendidikan dasar dan segala jenis fasilitas pelayanan kesehatan secara bertahap dan terbukti dapat mengurangi ketimpangan. Penelitian yang dilakukan oleh Gomanee *et al.* (2003) menemukan bahwa belanja pada sektor-sektor kesehatan, pendidikan dan sanitasi umum berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan akses masyarakat atas pelayanan kesehatan serta perbaikan dan peningkatan fasilitas kesehatan melalui alokasi anggaran di bidang kesehatan. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 171 ayat 1 menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Sementara itu, pada pasal 171 ayat 2 menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Dengan alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung program cakupan jaminan kesehatan nasional sehingga dapat meliputi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.

2.5 Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting yang tak terpisahkan bagi pertumbuhan ekonomi. Chemingui (2007) menyatakan bahwa secara umum diakui bahwa belanja publik di bidang infrastruktur (selain juga bidang pertanian dan sumber daya manusia) berdampak pada pengurangan kemiskinan dan memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian yang dilakukan Gomanee *et al.* (2003) juga menyebutkan bahwa belanja publik di bidang pelayanan sosial

seperti sanitasi umum (selain juga pendidikan dan kesehatan) merupakan belanja yang relevan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan infrastruktur telah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pada pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah ini dilakukan melalui badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah seperti disebutkan dalam pasal 4 ayat 1.

Terkait dengan pendanaan, pasal 4 ayat 3 undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: (a) kelompok masyarakat tidak mampu; (b) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; (c) pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan; (d) pembangunan listrik pedesaan.

Sementara itu, penyediaan infrastruktur jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dimana pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa penguasaan atas jalan ada pada negara. Yang selanjutnya dijelaskan dalam ayat 2 bahwa penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Wewenang yang dimaksud meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 2.

2.6 Belanja Daerah Urusan Pertanian

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian, sehingga pembangunan bidang pertanian sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat terutama bagi petani di pedesaan. Menurut Arifin (2004) dalam Wibowo (2014) pembangunan pertanian bukan semata proses peletakan pondasi dan pembenahan struktur pertanian dalam peta perekonomian, namun upaya serius dan sistematis untuk menerjemahkan paradigma keberpihakan ke dalam langkah nyata yang dapat dimengerti dan dilaksanakan masyarakat banyak. Fan dan Hazell (2001) melakukan penelitian di daerah-daerah pedesaan Cina dan India dan mengusulkan bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pembuat kebijakan harus meningkatkan intensifikasi di bidang pertanian baik di daerah yang potensial maupun yang kurang potensial. Fan dan Hazell juga menyimpulkan bahwa investasi pada infrastruktur daerah pedesaan, teknologi pertanian dan sumber daya manusia hampir sama produktifnya di daerah dengan curah hujan yang tinggi maupun daerah yang teraliri saluran irigasi dan keduanya berdampak besar terhadap kemiskinan.

Realitas yang ada saat ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih identik dengan masyarakat miskin terutama di pedesaan. Sehingga sektor pertanian menjadi penting dalam perekonomian negara dalam kaitannya dengan terbukanya kesempatan kerja dan ekonomi bagi masyarakat miskin di pedesaan. Diharapkan dengan pembangunan sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat miskin dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

2.7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Utama (2008) dalam Batafor (2011) rasio kemandirian daerah dihitung dengan membagi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan dalam satuan persen.

Semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah, demikian juga sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Harsey dan Blanchard (1977) dalam Halim (2004) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.8 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Pengertian efektivitas berhubungan erat dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik. Sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Hamzah, 2008). Rasio efektivitas menurut Halim (2004) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan kinerjanya semakin efektif, demikian pula sebaliknya.

2.9 Rasio Kecerassian Belanja

Menurut Batafor (2011) rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah proporsi belanja publik karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut Utama (2008) dalam Batafor (2011) rasio keserasian diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen.

2.10 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini terangkum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Alokasi Belanja Daerah untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum terhadap Penanggulangan Kemiskinan	Wahyudi	2011	Belanja urusan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum berpengaruh signifikan dalam mengurangi persentase penduduk miskin.
2	Analisis Pengaruh Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Era Desentralisasi Fiskal	Utama dan Kustiani	2012	Belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial terbukti secara signifikan menurunkan indeks kemiskinan. Sedangkan belanja fungsi perumahan dan fasilitas sosial tidak berpengaruh menurunkan indeks kemiskinan. Belanja fungsi pendidikan memiliki pengaruh terbesar dalam menurunkan indeks kemiskinan diikuti belanja fungsi perlindungan sosial, belanja ekonomi, dan belanja kesehatan.
3	Pengaruh Belanja Daerah untuk Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan Pertanian terhadap Penanggulangan Kemiskinan	Susilo	2014	Belanja urusan pendidikan, kesehatan, dan pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan dan pengaruh yang paling besar adalah belanja kesehatan.
4	<i>Public Spending and Poverty Reduction in an Oil-Based Economy: The Case</i>	Chemingui	2007	Kenaikan jumlah belanja publik untuk pendidikan dan kesehatan akan memicu pertumbuhan ekonomi dan

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>of Yemen</i>			pengurangan kemiskinan dibandingkan hanya meningkatkan belanja publik untuk pertanian. Namun karena perekonomian Yaman ditopang oleh sektor migas, kenaikan belanja publik untuk kesehatan dan pendidikan tidak akan meningkatkan produktivitas sektor migas, sehingga belanja pertanian lebih berperan dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
5	<i>The Relationship between Government Expenditure and Poverty A Cointegration Analysis</i>	Mehmood dan Sadiq	2010	Terdapat hubungan negatif antara belanja pemerintah dan kemiskinan seperti belanja untuk pembangunan fasilitas sosial, kelengkapan umum, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sehingga akan mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang.
6	<i>Aid, Pro-Poor Government Spending and Welfare</i>	Gomanee et al.	2003	Komposisi dari belanja publik dapat menjadi kunci bagi peningkatan kesejahteraan manusia, yang kemudian akan mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa belanja untuk sanitasi umum, kesehatan dan pendidikan dapat dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan.
7	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota	Ani dan Dwirandra	2014	Kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan sedangkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
8	Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah	Tias	2015	Kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio kemandirian dan rasio

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
	Terhadap Kemiskinan			keseerasian berpengaruh negatif secara signifikan pada kemiskinan. Sementara itu, rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang positif terhadap kemiskinan. Sedangkan rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
9	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru	Mizkan, dkk.	2015	Secara parsial dan simultan tingkat kemampuan/kemandirian, aktivitas keuangan, efektivitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru.
10	Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan	Anindya dan Dwirandra	2016	Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sementara rasio efisiensi dan efektivitas berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Belanja Urusan Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah berdampak besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Selain sebagai dasar bagi reformasi dunia pendidikan, dengan undang-undang ini pemerintah sudah harus mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan minimal 20 persen dari total APBN dan APBD. Hal ini menjadi penting karena investasi dalam sumber daya manusia (*human capital*) terutama bidang pendidikan

dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Yao (2007:108) menyatakan bahwa pendidikan terutama pendidikan dasar, telah terbukti berperan dalam pengurangan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan, dan menambah pendapatan bagi masyarakat miskin. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2011) menemukan adanya hubungan negatif antara belanja pendidikan dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan bahwa kenaikan belanja pendidikan akan menurunkan indeks kemiskinan. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2014) menemukan bahwa belanja pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : Belanja urusan pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

2.11.2 Pengaruh Belanja Urusan Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Kesehatan adalah salah satu indikator kesejahteraan suatu bangsa dan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi pemerintah dalam kerangka pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 171 ayat 1 dan ayat 2 mengatur alokasi belanja kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjamin terlaksananya program-program di bidang kesehatan terutama berkaitan dengan program cakupan jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Menurut *World Bank* (2014) kebijakan pokok ini akan membantu memertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Gupta dan Mitra (2004) dalam Boex *et al.* (2011) menyatakan bahwa peningkatan dalam pelayanan kesehatan dasar dapat membantu menanggulangi kemiskinan karena adanya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan pendapatan melalui kenaikan produktivitas, sementara pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan membentuk sumber daya manusia yang lebih baik dan berdampak pada tingkat kesehatan yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Kusmiatin (2014) tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan PMDN terhadap tingkat kemiskinan menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2011) menemukan bahwa belanja kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan. Demikian juga hasil penelitian Susilo (2014) menyimpulkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara belanja kesehatan terhadap indeks kemiskinan. Sementara itu, Kusmiatin (2014) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂ : Belanja urusan kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

2.11.3 Pengaruh Belanja Urusan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam percepatan pembangunan nasional karena infrastruktur memegang peran sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur juga dipercaya dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat miskin

seperti pembangunan infrastruktur jalan desa, irigasi, jaringan listrik, air bersih dan sanitasi. Secara garis besar, penyediaan infrastruktur menyangkut dua prinsip dasar yaitu akses yang lebih baik terhadap infrastruktur itu sendiri dan harga produk yang dihasilkan dari pemanfaatan infrastruktur, karena dengan akses yang lebih baik produktivitas meningkat, sehingga biaya input menurun dan selanjutnya bagi konsumen berarti terjadi penurunan biaya hidup. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan misalnya, dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan cakupan layanan tenaga listrik terutama di daerah yang belum berkembang, di daerah terpencil atau perbatasan dan di pedesaan. Sementara itu, dalam penyediaan infrastruktur jalan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Secara empiris, banyak peneliti yang menganalisis hubungan antara infrastruktur listrik, telekomunikasi, jalan dan irigasi dengan pengurangan kemiskinan. Fan *et al.* (2002) dalam Parikesit dkk. (2007) berpendapat bahwa investasi listrik mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pengurangan kemiskinan, studi di Tiongkok menunjukkan bahwa untuk setiap 10.000 Yuan yang dibelanjakan untuk pengembangan listrik, berpengaruh terhadap 2,3 orang. Listrik secara positif memengaruhi pendapatan penduduk miskin melalui transmisi tidak langsung (pertumbuhan ekonomi) dan transmisi langsung (produktivitas dan upah) di Filipina (Balisacan *et al.*, 2002) dan di Bangladesh (Songco, 2002).

Lokshin dan Yemstov (2003) dalam Parikesit dkk. (2007) dengan menggunakan data panel, menganalisis hubungan antara infrastruktur jalan dan sekolah di Georgia, menyimpulkan bahwa baik infrastruktur sekolah maupun jalan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan yang cukup besar bagi penduduk miskin. Proyek rehabilitasi sekolah mempunyai pengaruh paling besar terhadap kesejahteraan penduduk miskin. Sementara itu, Sawada dan Shinkai dalam Parikesit dkk. (2007: 25) melakukan studi kasus di Srilangka dengan menggunakan data panel lebih dari 12 bulan dan menemukan bahwa infrastruktur irigasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan baik kemiskinan kronis maupun kemiskinan sementara melalui peningkatan pendapatan permanen dan penurunan risiko pengeluaran. Penelitian Wahyudi (2011) menyimpulkan bahwa belanja urusan pekerjaan umum (infrastruktur) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃ : Belanja urusan pekerjaan umum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

2.11.4 Pengaruh Belanja Urusan Pertanian Terhadap Kemiskinan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional terutama di daerah-daerah. Investasi di bidang pertanian seharusnya menjadi salah satu prioritas pemerintah karena didukung dengan kondisi geografis di Indonesia. Namun, realita yang terjadi bahwa petani di Indonesia masih belum sejahtera, bahkan sebagian berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Munajat (2009) dalam Wibowo (2014) untuk menanggulangi kemiskinan di sektor pertanian dapat dilakukan melalui:

coorporate farming, peningkatan produktivitas pertanian dan petani, pengembangan industri pengolahan di pedesaan, intervensi pemerintah pada subsistem hulu dan subsistem hilir, dan peningkatan SDM pertanian.

Fan *et al.* (1999) dalam Wilhelm dan Fiestas (2005) menyatakan bahwa investasi di bidang pertanian dapat memicu peningkatan produktivitas yang secara langsung berpengaruh pada peningkatan pendapatan petani miskin, atau dapat berdampak tidak langsung bagi masyarakat miskin melalui harga bahan makanan yang lebih murah atau kenaikan penghasilan sebagai akibat peningkatan permintaan lapangan kerja di lahan pertanian maupun non-lahan pertanian di daerah pedesaan. Untuk itu, diperlukan keseriusan pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani. Lebih lanjut Wilhelm dan Fiestas (2005) menyatakan bahwa investasi di bidang pertanian, pendidikan dan infrastruktur memiliki efek positif terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Penelitian yang dilakukan Susilo (2014) menyimpulkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara belanja pertanian dengan indeks kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄ : Belanja urusan pertanian berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

2.11.5 Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Kemiskinan

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menurut Halim dan Kusufi (2012) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya

pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi juga partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan masyarakat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan Tias (2015) menemukan bahwa kemandirian daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014) menyimpulkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan pada tingkat kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis kelima sebagai berikut:

H₅: Rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

2.11.6 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kemiskinan

Menurut Hamzah (2008) pengertian efektivitas berhubungan erat dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik. Sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas menurut Halim dan Kusufi (2012) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan kinerjanya semakin efektif, demikian pula sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tias (2015) menemukan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan arah hubungan yang positif. Yang menandakan semakin besar efektivitas PAD maka jumlah kemiskinan juga akan semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan Mikzan dkk. (2015) menemukan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian Anindya dan Dwirandra (2016) menemukan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis keenam sebagai berikut:

H₆ : Rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kemiskinan

2.11.7 Pengaruh Rasio Keserasian Belanja Modal Terhadap Kemiskinan

Rasio keserasian menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah. Alokasi belanja modal daerah yang semakin besar mencerminkan bahwa daerah semakin memprioritaskan keuangannya untuk belanja fisik yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Penelitian Tias (2015) menyimpulkan bahwa rasio keserasian belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan dengan arah hubungan yang negatif. Yang berarti semakin besar alokasi belanja modal maka tingkat kemiskinan akan makin menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Zikriah (2009)

menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi belanja modal memberi dampak positif terhadap penduduk miskin di Aceh, karena ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan dampak positif dari peningkatan belanja modal pemerintah dan akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis ketujuh sebagai berikut:

H₇ : Rasio keserasian belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek itu (Sugiyono, 2014). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang seluruhnya berjumlah 15 kabupaten/kota.

3.1.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mengeluarkan laporan keuangan dari tahun 2011 sampai dengan 2013.
- b. Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang laporan keuangannya diterbitkan di situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penulis akan menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang meliputi laporan anggaran dan realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan data indeks kemiskinan (P_0) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data indeks kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat diperoleh dengan cara mengunduh di *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (www.lampung.bps.go.id). Sedangkan data anggaran dan realisasi belanja daerah dapat diunduh di *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini akan menggunakan variabel belanja daerah dan kinerja keuangan daerah sebagai variabel independen. Variabel belanja daerah akan diproksikan dengan belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja pekerjaan umum, dan belanja pertanian. Sementara untuk variabel kinerja keuangan daerah akan diproksikan dengan rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio keserasian belanja modal. Karena satuan ukuran

variabel belanja daerah (dalam penelitian ini belanja pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan pertanian) memiliki satuan angka paling besar yang akan menimbulkan heteroskedastisitas sehingga harus diubah ke bentuk logaritma natural (\ln). Variabel belanja daerah dan kinerja keuangan daerah masing-masing dapat diukur dengan:

a. Belanja Urusan Pendidikan (PEND)

Variabel belanja pendidikan dalam penelitian ini adalah belanja pendidikan per kapita yaitu belanja daerah pada APBD dalam urusan pendidikan dibagi jumlah penduduk tiap-tiap kabupaten/kota, mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2011), yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Pendidikan Per Kapita} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pendidikan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{PEND} = \text{Ln}(\text{Belanja Pendidikan Per Kapita})$$

b. Belanja Urusan Kesehatan (KES)

Variabel belanja kesehatan dalam penelitian ini adalah belanja kesehatan per kapita yang dihitung dari belanja daerah pada APBD dalam urusan kesehatan dibagi jumlah penduduk tiap kabupaten/kota, mengikuti penelitian yang dilakukan Wahyudi (2011), yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Kesehatan Per Kapita} = \frac{\text{Realisasi Belanja Kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{KES} = \text{Ln}(\text{Belanja Kesehatan Per Kapita})$$

c. Belanja Urusan Pekerjaan Umum (PU)

Variabel belanja pekerjaan umum dalam penelitian ini adalah belanja pekerjaan umum/infrastruktur per kapita yang dihitung dari belanja daerah pada APBD

untuk urusan pekerjaan umum dibagi jumlah penduduk tiap kabupaten/kota, mengikuti penelitian yang dilakukan Wahyudi (2011), yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja PU Per Kapita} = \frac{\text{Realisasi Belanja PU}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{PU} = \text{Ln} (\text{Belanja Pekerjaan Umum Per Kapita})$$

d. Belanja Urusan Pertanian (PERT)

Variabel belanja pertanian dalam penelitian ini adalah belanja pertanian per kapita yang dihitung dari belanja daerah pada APBD untuk urusan pertanian dibagi jumlah penduduk tiap kabupaten/kota, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Pertanian Per Kapita} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pertanian}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{PERT} = \text{Ln} (\text{Belanja Pertanian Per Kapita})$$

e. Rasio Kemandirian (MAND)

Variabel rasio kemandirian dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, seperti pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian menurut Halim (2004) dapat dihitung dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Mahsun (2006) menyusun suatu pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah yang tampak dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Mahsun (2006)

f. Rasio Efektivitas (EFEK)

Variabel rasio efektivitas dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas PAD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas menurut Halim (2004) dapat dihitung dengan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

Kriteria penilaian tingkat efektivitas PAD disusun oleh Mahsun (2006) seperti terlihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Rasio dan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber: Mahsun (2006)

g. Rasio Kesenjangan (SER)

Variabel rasio keserasian dalam penelitian ini adalah rasio keserasian belanja modal yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah. Alokasi belanja modal yang semakin besar mencerminkan prioritas keuangan daerah untuk belanja fisik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Rasio keserasian menurut Halim (2004) dapat dihitung dengan:

$$\text{Rasio Kesenjangan} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Hasil penilaian kinerja berdasarkan rasio keserasian dapat dilihat dari Tabel 3.3 yang disusun oleh Mahsun (2006) sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kesenjangan Belanja Keuangan Daerah

Kesenjangan Belanja Keuangan Daerah Otonom	Rasio Kesenjangan Belanja (%)
Tidak Serasi	0 – 20
Kurang Serasi	>20 – 40
Cukup Serasi	>40 – 60
Serasi	>60 – 80
Sangat Serasi	>80 – 100

Sumber: Mahsun (2006)

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang ditunjukkan dengan variabel indeks kemiskinan (P_0) atau persentase penduduk miskin yang menggunakan *Head Count Index* (HCI- P_0), merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Penggunaan *head count index* untuk menghitung kemiskinan disesuaikan dengan salah satu metode yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk menghitung persentase penduduk miskin.

Keterangan:

$$Z = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^q \left[\frac{z - y_t}{z} \right]^0$$

Z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di bawah garis kemiskinan

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Selain itu, variabel indeks kemiskinan akan di-logaritma natural-kan untuk

mendekatkan skala data dengan variabel independen. Sehingga indeks

kemiskinan dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus:

$$P0 = \text{Ln (Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan)}$$

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel (*panel pooled data*) dalam menganalisa pengaruh belanja daerah dan kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya oleh Susilo (2014) dengan menambahkan variabel kinerja keuangan daerah sebagai variabel independen, sementara untuk variabel kemiskinan hanya menggunakan indeks kemiskinan (*headcount index*).

3.5.1 Analisis Regresi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi data panel. Penelitian ini akan menggunakan data per kapita untuk belanja daerah, hal ini dilakukan untuk menetralkan perbedaan jumlah penduduk antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Selain itu, karena pengaruh belanja daerah pada tahun t tidak langsung berpengaruh pada

tahun t tersebut melainkan diperlukan jeda waktu, sehingga akan dipakai model *lag*. Oleh karena itu, persamaan regresi berganda pada penelitian ini menjadi:

$$P_0 it = \beta_0 + \beta_1 \text{PEND } i(t-1) + \beta_2 \text{KES } i(t-1) + \beta_3 \text{PU } i(t-1) + \beta_4 \text{PERT } i(t-1) + \beta_5 \text{MAND } it + \beta_6 \text{EFEK } it + \beta_7 \text{SER } it + \varepsilon$$

Keterangan :

- $P_0 it$: Indeks kemiskinan/persentase penduduk miskin kabupaten/kota i pada tahun t
 PEND : Anggaran Belanja urusan pendidikan per kapita kabupaten/kota i pada tahun $t-1$
 KES : Anggaran Belanja urusan Kesehatan per kapita kabupaten/kota i pada tahun $t-1$
 PU : Anggaran Belanja urusan Pekerjaan Umum per kapita kabupaten/kota i pada tahun $t-1$
 PERT : Anggaran Belanja urusan Pertanian per kapita kabupaten/kota i pada tahun $t-1$
 MAND : Rasio Kemandirian daerah kabupaten/kota i pada tahun t
 EFEK : Rasio Efektivitas PAD Rasio Kemandirian daerah kabupaten/kota i pada tahun t
 SER : Rasio Keserasian PAD Rasio Kemandirian daerah kabupaten/kota i pada tahun t
 $\beta_0 - \beta_7$: Koefisien regresi berganda
 ε : *Error term*

Karena penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisa pengaruh belanja daerah dan kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung, maka menurut Nachrowi dan Usman (2006: 317) untuk mengestimasi model regresi data panel dapat digunakan tiga teknik uji regresi diantaranya dengan menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)/ common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Dari ketiga teknik estimasi tersebut akan dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel.

Pemilihan tersebut didasarkan beberapa pengujian sebagai berikut:

3.5.1.1 Uji Statistik F (Uji Chow)

Uji Chow berguna untuk memilih antara model OLS tanpa variabel *dummy* (*common effect*) dan model *fixed effect*. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara F_{stat} dengan F_{tabel} , dengan hipotesis H_0 menggunakan model *common effect* dan H_1 menggunakan model *fixed effect*. Nilai statistik hitung F adalah sebagai berikut:

$$F_{stat} = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/n - 1}{(RSS_2)/(nt - n - k)}$$

Keterangan :

RSS1 = Residual Sum of Square dari model *Common Effect*

RSS2 = Residual Sum of Square dari model *Fixed Effect*

n = Jumlah perusahaan (*cross section*)

nt = Jumlah *cross section* dikali jumlah *time series*

k = Jumlah variabel independen

Sedangkan F_{tabel} dicari dengan menggunakan tabel F, ataupun dengan menggunakan alat bantu *Microsoft Excel*. Jika nilai Chow statistik (F_{stat}) > F_{tabel} , maka hipotesis H_0 ditolak yang artinya harus menggunakan model *fixed effect*. Dan jika nilai F_{stat} < F_{tabel} , maka hipotesis H_0 diterima, yang artinya model *common effect* (OLS) yang akan digunakan untuk mengestimasi data panel.

3.5.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *random effect*. Hipotesis yang dibangun dalam uji Hausman ini adalah H_0 menggunakan *random effect* dan hipotesis alternatifnya menggunakan model *fixed effect*. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *chi square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika *chi square* hitung lebih tinggi dari *chi Square* tabel dan *p-value* signifikan maka H_0 ditolak, sehingga model *fixed effect* yang lebih tepat untuk

digunakan. Namun apabila *chi square* hitung lebih rendah dari *chi square* tabel dan *p-value* signifikan maka hipotesis H_0 diterima, sehingga model *random effect* lebih tepat digunakan untuk mengestimasi regresi data panel.

3.5.1.3 Uji *Lagrange Multiplier*

Menurut Ghozali (2006) “uji LM akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey. Pengujian Breusch-Godfrey (*BG test*) dilakukan dengan *me-regress* variabel pengganggu (residual)”. Pengujian ini dilakukan untuk menguji mana yang paling baik antara model *common effect* dengan model *random effect*. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect*

H_1 : Model *random effect*

Dari hasil uji *lagrange multiplier* akan dilihat nilai statistik *chi-squares*. Apabila nilai dari uji *lagrange multiplier* lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-squares*, maka kita menolak H_0 . Dengan kata lain akan digunakan model *random effect* karena dianggap lebih baik. Apabila nilai dari hasil uji *lagrange multiplier* berada di bawah nilai kritis statistik *chi-square* maka akan menerima H_0 . Jika H_0 diterima maka dapat diambil kesimpulan bahwa model yang lebih baik digunakan adalah *common effect*.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang diperlukan agar regresi linier berganda mencapai kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), atau menjadi model estimasi yang paling baik harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan diantaranya uji heteroskedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah persebaran data berdistribusi normal atau tidak. Dimana yang diuji dalam model regresi adalah apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam pengujian normalitas data ini, pada penelitian ini akan digunakan uji Jarque Bera dan membandingkannya dengan nilai *chi square* tabel. Hipotesis yang dibangun adalah H_0 data terdistribusi normal dan H_1 data tidak terdistribusi normal. H_0 ditolak jika hasil JB hitung lebih besar dari nilai *chi square* tabel, artinya data tidak terdistribusi normal. Namun bila nilai JB hitung lebih kecil dari nilai *chi square* tabel maka H_0 diterima, artinya data terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Masalah autokorelasi akan muncul jika terjadi korelasi di dalamnya. Masalah ini timbul karena *residual* tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering muncul pada data runtut waktu (*time series*) karena gangguan populasi cenderung memengaruhi populasi yang sama pada periode berikutnya. Menurut Setyadharma (2010) dalam Susilo (2014) salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah Uji Durbin-Watson (DW-Test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* diantara variabel penjelas. Hipotesis yang diuji adalah $H_0 : \rho = 0$ (hipotesis nolnya adalah tidak ada autokorelasi) dan $H_1 : \rho \neq 0$ (hipotesis alternatifnya adalah ada autokorelasi).

3.5.2.3 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier antar variabel independen. Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya masalah multikolinieritas adalah dengan membuat matrik korelasi antar variabel independen, jika nilai korelasi antar variabel berada pada nilai di atas 0,8 maka ada multikolinieritas. Sebaliknya jika berada di bawah 0,8 maka tidak ada multikolinieritas. Untuk melakukan pengujian ini, penulis menggunakan *software Eviews 8.1*. Selanjutnya akan diperoleh nilai korelasi antar variabel model. Setelah didapatkan hasil uji dengan Eviews maka dianalisa hubungan antar variabel independen, apakah terjadi multikolinieritas atau tidak.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* antar satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah uji *Glesjer*. Menurut Winarno (2015), uji *Glesjer* menggunakan nilai *absolut residual* sebagai variabel dependen. Jika nilai probabilitas hasil uji *Glesjer* di bawah α maka dapat disimpulkan mengandung heteroskedastisitas.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan pengujian untuk memilih diantara ketiga model yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel dan melakukan uji asumsi klasik, maka analisis dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, diantaranya:

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R^2 menunjukkan besar distribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diformulasikan dengan menggunakan rumus:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan:

ESS = Jumlah kuadrat *error*

TSS = Jumlah kuadrat total

Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai *R-square* kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Bila nilai R^2 mendekati satu menandakan bahwa variabel-variabel independen mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga pengaruh model tersebut dapat dikatakan benar. Sehingga, semakin besar nilai R^2 , garis regresi yang terbentuk semakin baik dan semakin kecil nilai dari R^2 maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi. Hal ini diperlukan karena dalam suatu penelitian atau observasi perlu dilihat seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan variabel dependennya.

3.5.3.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji *t*)

Uji *t* bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Rumus untuk memperoleh t_{hitung} adalah:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

Keterangan:

β_i = koefisien regresi

se = *standard error*

Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka hipotesis alternatif yang menyatakan suatu variabel independen secara individu memengaruhi variabel dependen dapat diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika t_{hitung} lebih rendah dari t_{tabel} maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , uji t juga dapat dilakukan dengan melihat probabilitas yang terdapat dalam *output* komputer, jika probabilitas pada *output* komputer di bawah α yang ditentukan maka koefisien regresi dianggap signifikan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas belanja pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, dan rasio kemandirian, efektivitas serta keserasian secara terpisah (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kemiskinan (P_0). Penelitian ini akan mengambil tingkat signifikansi 0,05.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dalam penelitian yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang ingin diuji adalah apakah semua

parameter dalam model sama dengan nol. Mekanisme yang digunakan untuk menguji hipotesis dari parameter dugaan secara bersama-sama (Uji F-statistik) :

Hipotesis : $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$ (model secara tidak signifikan menjelaskan variabel dependen)

H_1 = minimal ada satu parameter dugaan (β) tidak sama dengan nol.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Untuk memperoleh F_{hitung} dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah observasi

k = banyaknya variabel bebas

Bila nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan apabila nilai F_{hitung} lebih rendah daripada F_{tabel} maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah urusan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan anggaran belanja urusan pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota akan mengakibatkan penurunan persentase penduduk miskin.
2. Belanja daerah urusan kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan alokasi anggaran belanja kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih di bawah standar yang ditetapkan. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan penelitian sebelumnya, sehingga belanja urusan kesehatan tidak dapat mengurangi angka kemiskinan.
3. Belanja daerah urusan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan sifat belanja pekerjaan umum yang cenderung padat modal dan tidak berdampak langsung dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini tidak berhasil

membuktikan penelitian sebelumnya, sehingga belanja urusan pekerjaan umum tidak dapat mengurangi angka kemiskinan.

4. Belanja daerah urusan pertanian tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan alokasi belanja pertanian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih relatif rendah. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan penelitian sebelumnya, sehingga belanja urusan pertanian tidak dapat mengurangi angka kemiskinan.
5. Rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan angka rasio kemandirian daerah atau dengan kata lain semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota dibandingkan total pendapatan daerah akan mengakibatkan penurunan angka kemiskinan.
6. Rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan angka rasio efektivitas atau dengan kata lain semakin besar capaian realisasi PAD dibandingkan target PAD akan mengakibatkan bertambahnya persentase penduduk miskin.
7. Rasio keserasian belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan rasio keserasian belanja pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menunjukkan tren penurunan atau berfluktuasi selama periode penelitian. Penelitian ini tidak dapat membuktikan hasil penelitian sebelumnya, sehingga rasio keserasian belanja modal tidak dapat mengurangi angka kemiskinan.

8. Secara keseluruhan, variabel rasio kemandirian daerah (MAND) memberikan pengaruh terbesar dalam penurunan kemiskinan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Selanjutnya, belanja urusan pendidikan memberikan pengaruh terbesar kedua dalam penurunan kemiskinan. Berbeda dengan hipotesis, variabel belanja urusan kesehatan, belanja urusan pekerjaan umum, belanja urusan pertanian dan rasio keserasian belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan yang dihadapi penulis terkait data penelitian, yaitu

1. Data anggaran dan realisasi belanja per kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang tersedia di *website* Dirjen Perimbangan Keuangan pada periode sebelum tahun 2011 tidak lengkap.
2. Data indeks kemiskinan yang tersedia di *website* BPS Provinsi Lampung berupa data kemiskinan per kabupaten/kota hanya tersedia hingga tahun 2013.

Akibatnya penulis tidak dapat menggunakan data *time series* yang lebih panjang, sehingga model *lag* yang digunakan penulis juga menjadi lebih pendek. Selain itu, hal ini menyebabkan jumlah sampel yang dapat digunakan hanya 11 kabupaten/kota dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung sehingga kurang efektif dalam mengukur pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung diantaranya:

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar memprioritaskan untuk meningkatkan alokasi belanja urusan pendidikan karena terbukti memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menurunkan angka kemiskinan.
2. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar dapat meningkatkan alokasi belanja urusan kesehatan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu 10% dari total belanja dalam APBD. Hal ini dikarenakan telah terbukti dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa belanja urusan kesehatan dapat mengurangi kemiskinan.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar dapat meningkatkan alokasi belanja urusan pertanian karena telah terbukti bahwa belanja urusan pertanian mampu memberikan pengaruh dalam penurunan kemiskinan. Namun karena jumlah alokasinya terlalu rendah sehingga pengaruhnya tidak signifikan.
4. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar mengembangkan dan menggali potensi daerahnya sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam penggunaan anggaran terutama untuk menjalankan program-program prioritas seperti program pengentasan kemiskinan dan peningkatan fasilitas layanan publik. Karena terbukti kemandirian daerah mampu berperan sangat besar dalam penurunan kemiskinan. Namun demikian, dalam upaya menggali dan meningkatkan potensi PAD hendaknya memerhatikan kepentingan masyarakat terutama masyarakat miskin. Karena dari pengolahan data terlihat adanya pengaruh positif dan signifikan dari rasio efektivitas PAD terhadap kemiskinan. Hal ini berkaitan dengan harga barang atau fasilitas publik yang

harus dibayar masyarakat, sehingga jangan sampai dalam upayanya meningkatkan perolehan PAD justru makin membebani masyarakat miskin.

5. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar meningkatkan alokasi belanja modal agar tingkat keserasian belanja modalnya meningkat menjadi lebih serasi karena dari berbagai literatur, peningkatan belanja publik dapat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.4 Saran

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama agar menggunakan data *time series* yang lebih panjang sehingga data dapat diteliti dengan *lag time* yang lebih panjang pula. Hal ini disebabkan beberapa variabel dalam penelitian ini cenderung memiliki pengaruh jika diteliti dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lain yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di luar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, Putri N. L., & A. Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* , Vol. 6, No. 3. pp. 481-497.
- Anindya P., N.K., & A. Dwirandra. 2016. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* , Vol. 15 No. 1. pp. 55-81.
- Astuti, Wuku. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Journal LP3M STIEBBANK Universitas Widya Mataram* , Vol 6 No.1. pp 1-18.
- Batafor, Gregorius G. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur*. Tesis. Universitas Udayana, Bali.
- Boex, J., E. Heredia-Ortiz, J. Martinez-Vazquez, A. Timofeev, & G.Yao. 2006. *Fighting Proverty Through Fiscal Decentralization*. Georgia: USAID.
- Chemingui, M. A. 2007. Public Spending and Poverty Reduction in an Oil-Based Economy: The Case of Yemen. *IFPRI Discussion Paper No. 00701*
- Fan, S. & P. Hazell. 2001. Return to Public Investments in The Less-Favored Areas of India and China. *American Journal for Agriculture and Economic*, Vol 83 No. 5, pp 1217-1222.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gomanee, K., O. Morrissey, P. Mosley, & A. Verschoor. 2003. Aid, Pro-Poor Government Spending and Welfare. *CREDIT Research Paper*, Vol. 3 No. 3.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

- _____ & M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, A. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Hasan, T. I. Ben., & Zikriah. 2009. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh.: *Jurnal Ekonomi*. Banda Aceh: FEB-Universitas Syiah Kuala.
- Haughton, J., & S.R. Khandker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, DC: The International Bank for Reconsrtruction and Development/The World Bank.
- Kusmiatin. 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan PMDN Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan*. (Skripsi). Makassar: FEB-Universitas Hasanuddin.
- Mehmood, R., & S. Sadiq. 2010. The Relationship Between Government Expenditure and Poverty: Cointegration Analysis. *Romanian Journal of Fiscal Policy*, Vol. 1 No. 1, pp.29-37.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF- FE UGM
- Mikzan, Hendra, Kamaliah, & R. Agusti. 2015. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru. *Jurnal SOROT*, Vol. 10, No. 1. pp 114-130. LPPM Universitas Riau.
- Mosley, P., J. Hudson., & A. Verschoor. 2004. Aid, Poverty Reduction, and The 'New Conditionality'. *The Economic Journal* , 114, F217-F243.
- Multifiah. 2011. Telaah Kritis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Tinjauan Konstitusi. *Journal of Indonesian Applied Economics* , Vol.5 No. 1, pp. 1-27.
- Nachrowi, N. D. & H. Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Parhah, Siti. 2006. Kontribusi Desentraliasasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Analisis Data *Cross Section* Tahun 2002). <http://file.upi.edu/>. Diakses tanggal 27 April 2016.

- Parikesit, D., C. Sugiyanto, B. Setiawan, C. Sitompul, M. Sahril, G. Hartana, dkk. 2007. *Kajian Aspek Kemasyarakatan Dalam Pengembangan Infrastruktur Indonesia*. Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 1999. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 2004. *Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 2009. *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 2009. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta. DPR RI.
- _____. 2015. *Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta. DPR RI.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 No. 1, pp 103-124. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sidik, Machfud. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. *Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia"*. Yogyakarta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susilo, H. B. 2014. *Pengaruh Belanja Daerah untuk Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan Pertanian terhadap Penanggulangan Kemiskinan*. (Skripsi). Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Tias, N. N. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kemiskinan (Studi pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2013). *Jurnal Ekonomi Universitas Brawijaya* .

- Todaro, M.P & S.C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Utama, S.B. & N.A. Kustiani. 2012. Analisis Pengaruh Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Era Desentralisasi Fiskal. *Kajian Akademis BPPK*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Wahyudi. 2011. *Pengaruh Alokasi Belanja Daerah untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009)*. (Tesis). Jakarta: FEB-Universitas Indonesia.
- Wibowo, M. E. 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Widodo, A., Waridin, & J. Maria. 2011. Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* , Vol. 1, No.1. pp 25-42.
- Wilhelm, V., & I. Fiestas. 2005. *Exploring the Link Between Public Spending and Poverty Reduction: Lessons from the 90s*. Washington, DC: The World Bank.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- World Bank. 2014. *Indonesia Economic Quarterly: Delivering Change*. Washington, DC: The World Bank.
- Yao, G. A. 2007. *Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence*. Dissertation. Georgia: Georgia State University.

<http://www.bps.go.id/>.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.